

IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Lisna Rahmawati¹, Agus Sya'bani Arlan², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: lisnarhmwti28@gmail.com

ABSTRAK

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dalam bentuk aplikasi digital melalui smartphone berbasis android. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil dengan penarikan informan secara purposive sampling yang berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Pertama, pada subvariabel komunikasi yaitu indikator transmisi tidak berfungsi dengan baik, kejelasan kurang baik, konsistensi kurang baik. Kedua, sumber daya yaitu staf bekerja dengan baik, ruangan kurang tertata, aparat dikatakan bekerja dengan baik. Ketiga, pemeringkatan indikator sikap pelaksana dikatakan lancar, insentif kurang baik. Keempat, struktur birokrasi indikator standar operasional sistem (SOP) dapat dikatakan baik, fragmentasi cukup baik. Selain itu, kurangnya animo masyarakat dan konektivitas internet menjadi faktor penghambat Program Identitas Kependudukan Digital (DPI). Di saat yang sama, keberadaan mentor menjadi faktor pendorongnya.

Kata Kunci: Impelementasi, Identitas Kependudukan Digital

ABSTRACT

Digital Population Identity (IKD) is electronic information used to present population documents in the form of a digital application via an Android-based smartphone. The aim of this research is to determine the implementation of Digital Population Identity (IKD) in the North Hulu Sungai Regency Population and Civil Registration Service and the factors that influence it. The method used in this research is Qualitative Descriptive. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data source was taken by purposive sampling of 10 informants. After the data is collected, it is then analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the Digital Population Identity (IKD) Program at the North Hulu Sungai Regency Population and Civil Registration Service is still not good. First, the communication sub-variable, namely. transmission indicator does not function properly, clarity is not good, consistency is not good. Second, the resources, namely the staff work well, the room is not well organized, the apparatus is said to work well. Third, the ranking of implementing attitude indicators is said to be smooth, incentives are not good. Fourth, the bureaucratic structure of the system operational standard indicators (SOP) can be said to be good, fragmentation is quite good. Apart from that, the lack of public interest and internet connectivity are factors inhibiting the Digital Population Identity Program (DPI). At the same time, the presence of a mentor is a motivating factor.

Keyword: Implementation, Digital Population Identity

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pada aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Jika melihat

pada tatanan global masa kini, masyarakat dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien. Tuntutan persaingan era globalisasi tersebut juga menjadi tantangan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik.

Pelayanan publik telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial di negara modern. Kebutuhan pelayanan publik akan melibatkan dua aktor, yaitu negara sebagai penyedia pelayanan publik dan individu warga negara sebagai penerima yang menikmati pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan publik memberikan cerminan hubungan antara sebuah negara dengan warga negaranya. Tuntutan publik pun akhirnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik menyeluruh. Caranya dengan meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan publik serta pemberian pelayanan secara menyeluruh. Sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap semua pihak tanpa adanya diskriminasi.

Kebutuhan akan perubahan dalam bidang pelayanan publik di era digital, penerapan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dirasa mampu meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang terjadi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (e-commerce), perbankan (e-banking), pemerintahan (e-Government), data kependudukan (e-KTP), pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan (e-medicine, e-laboratory), dan lain sebagainya yang kesemuanya itu berbasis elektronik.

Pemerintah menerapkan e-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. E-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-Government merupakan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.

Salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program e-KTP Digital. E-KTP Digital merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja.

Kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan setiap penduduk Indonesia untuk bisa

memiliki dokumen kependudukan secara digital. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Dukcapil melakukan inovasi dalam pemanfaatan dokumen kependudukan yang dapat diakses secara online yaitu dengan menggunakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah disetiap daerah, karena pelaksanaan e-KTP digital dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dalam aplikasi digital melalui smartphone berbasis android, berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 72 tahun 2022. Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah mulai diterapkan di Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia sejak tahun 2022 lalu.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan terus bertambah dari tahun ketahun hingga hampir mencapai 278.118.866 jiwa pada tahun 2023 lalu. Dari jumlah penduduk tersebut Dirjen Teguh menyampaikan sudah 204,971,858 jiwa penduduk yang melakukan wajib KTP-el yang dimana jumlah perekaman sebesar 99,26%. Dari banyaknya penduduk yang sudah rekam data tersebut Dirjen Dukcapil mengharapkan 25% warganya memiliki KTP Digital. Target tersebut berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Di Kalimantan selatan tercatat jumlah penduduknya mencapai 4.205.816 jiwa. Khususnya kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 232.226 jiwa penduduk. Dari jumlah penduduk tersebut sudah hampir 168.249 jiwa penduduk yang sudah melakukan perekaman data E-KTP. Dengan jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman data E-KTP tersebut dirjen Dukcapil memberikan target 42.062 jiwa penduduk untuk memiliki data KTP Digital di smartphone.

Dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini dapat memudahkan masyarakat dalam penggunaan E-KTP dan lain-lain. Dengan memiliki IKD, kita dapat memastikan data kita aktif dan dapat digunakan di pelayanan publik lainnya, seperti dalam verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, pelayanan bandara, perbankan, dan lain-lain. Nantinya, kita juga dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi ini.

Berdasarkan observasi terdapat beberapa masalah dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi secara langsung terkait Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga masih banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang program Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dianggap tidak terlalu penting oleh masyarakatnya dikarenakan sudah memiliki E-KTP berbentuk fisik yang dimilikinya, padahal dengan adanya aplikasi ini malah menambah mempermudah kita dalam melakukan penyimpanan data pribadi.

3. Minimnya sistem koneksi internet yang dimiliki seperti WIFI dan modem internet sehingga jaringan yang digunakan untuk mengaktifasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih lelet.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, didefinisikan sebagai cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian yang dimaksud yaitu di mana peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan terkait dengan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori yang relevan dengan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara maka untuk mengukur Impelementasi menurut George C Edward III.

1. Komunikasi

Pentingnya penyebaran informasi yang jelas dan konsisten mengenai IKD kepada semua pihak terkait. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, efektivitas implementasi IKD memerlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat dan petugas administrasi agar mereka memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan ini.

2. Sumberdaya

ersedianya sumber daya yang memadai, termasuk teknologi, dana, dan tenaga kerja yang kompeten. Implementasi IKD membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai dan pelatihan bagi petugas untuk memastikan mereka mampu menjalankan sistem IKD dengan efektif.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan terhadap IKD. Di sini, dukungan dan kesediaan petugas serta pemangku kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat krusial. Tanpa komitmen yang kuat, implementasi IKD tidak akan berjalan lancar.

4. Struktur Birokrasi

Desain dan prosedur organisasi yang mendukung implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit akan mempermudah pelaksanaan IKD. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pembenahan struktur birokrasi yang mendukung pengelolaan

IKD dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan ini.

Melalui analisis dengan teori Implementasi George C Edward III, maka faktor yang mempengaruhi Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi :

1. Faktor pendukung dari Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara , meliputi :
 - a. Adanya Fasilitator
Keberadaan fasilitator yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sangat mendukung implementasi IKD. Fasilitator ini bertugas memberikan informasi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya IKD, serta membantu dalam proses pendaftaran dan penggunaan sistem IKD. Mereka juga bisa memberikan bantuan teknis dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna.
2. Faktor penghambat dari Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara , meliputi :
 - a. Kurangnya minat
Rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan IKD bisa menjadi hambatan besar. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat IKD, ketakutan terhadap teknologi baru, atau kebiasaan lama yang sulit diubah. Untuk mengatasi ini, diperlukan upaya sosialisasi yang intensif dan pendekatan yang lebih personal kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan minat mereka.
 - b. Sistem koneksi internet
Kualitas koneksi internet yang tidak memadai menjadi penghambat signifikan dalam implementasi IKD. Di beberapa daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, akses internet mungkin masih terbatas atau tidak stabil, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengakses sistem IKD secara online. Untuk mengatasi ini, perlu ada upaya peningkatan infrastruktur jaringan internet di daerah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, dalam sub variabel komunikasi yaitu pada indikator Transmisi yang belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait program tersebut dan indikator pada kejelasan yang kurang baik karena masih diperlukan lagi sosialisasi untuk ke masyarakatnya secara langsung dan harus diberi penjelasan yang lebih maksimal dan indikator konsistensi kurang baik dilihat dari penyampaian komunikasinya harus lebih intens. Kedua, sumber daya yaitu pada indikator sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik dilihat dari para pegawai disdukcapil yang hampir semua rata-rata sudah bisa melakukan tegistrasi akun IKD dan Fasilitas yang kurang baik dilihat dari sarana yang dimiliki seperti laptop dan modem masih sedikit dan dapat dikatakan kurang baik, wewenang dikatakan sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari adanya fasilitator berupa pegawai disdukcapil yang telah hampir semua pegawai bisa melakukan registrasi IKD itu sendiri yang terakhir informasi dikatakan kurang baik, dilihat dari penyampaian informasi kepada masyarakat, sebaiknya diadakan lagi sosialisasi agar

penyampaian informasi jelas dan detail. Ketiga, Disposisi pada indikator Sikap Pelaksana dikatakan berjalan dengan baik, karena pegawai disdukcapil sangat mendukung adanya program tersebut dan aktif yang dimana hampir semua pegawai disdukcapil bisa melakukan aktivasi IKD dan tidak selalu mengandalkan pegawai khusus dalam menjalankannya dan Insentif dikatakan kurang baik karena tidak adanya insentif yang diberikan kepada agen pelaksana baik itu pegawai disdukcapil ataupun para pengguna aplikasi IKD tersebut. Keempat, Struktur Birokrasi pada indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dikatakan sudah baik, dilihat dari penerapan program ini sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimana ketika masyarakat meinta pelayanan pihak dinas selalu siap memberikan layanan terbaiknya dan Fragmentasi dapat dikatakan cukup baik karena dengan adanya Program Identitas Kependudukan Dgital (IKD) tersebut masyarakat terbantu dalam penyimpanan data miliknya.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 2 faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat yang Pertama, kurangnya minat dan Kedua, sistem koneksi internet. Faktor pendorong yaitu adanya Fasilitator

DAFTAR PUSTAKA

Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang *Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*.